

TEORI STRUKTURASI DALAM KEPEMIMPINAN LOKAL

Tinjauan Wacana Surakarta Menjadi Propinsi

Priyandono WA

Abstract

Structuring of local leadership is a term that saw the potential in a direction that can be initiated by the institutionalization of the quality of local governments with existing regional leaders, including district heads, mayors and community leaders. Awareness to develop the quality and awareness of social structure for developing human resources as a whole will produce a synergy of quality of government as well. To that end, this expectation rests on the embryonic stage Regents and Mayors

Key word : local leadership, Structuration

PENDAHULUAN

Wacana Surakarta sebagai Ibukota Propinsi bukan merupakan wacana yang baru, wacana ini tak lepas dari sejarah panjang perjalanan berdirinya kota Surakarta. Negara ini pernah mencatat adanya Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Keberadaan Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa yang dimulai Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946 yang terdiri atas Daerah Istimewa Kasunanan dan Daerah Istimewa Mangkunagaran dan diperintah secara bersama oleh KNI Daerah Surakarta, Susuhunan dan Mangkunegara.

Penetapan status Istimewa ini dilakukan Presiden RI Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunagaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia tersebut. Berakhirnya Surakarta sebagai Propinsi di picu dengan munculnya gerakan Anti swapraja/anti monarki/anti feodalisme di Surakarta. Karena banyaknya kerusuhan, dengan peristiwa penculikan dan

pembunuhan pejabat Propinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta maka Pemerintah RI membubarkan Propinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta

Kajian dari para pakar Perguruan tinggi dan dukungan dari wilayah sekitar bak gayung bersambut, apalagi munculnya atau terbentuknya propinsi baru memang dimungkinkan dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya dimungkinkannya pembentukan wilayah administratif baru tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Lepas dari dinamika wacana, diskusi maupun pretensi tentang Surakarta sebagai Ibukota Propinsi, menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi dari sudut teori dan pemikiran yang bersandar pada kejernihan keilmuan.

TEORI STRUKTURASI

Ada dua pemikiran besar di dalam kajian ilmu sosial yang melihat hubungan antara lingkungan sosial dengan individu.

Pandangan pertama mengatakan bahwa tindakan individu tidak lebih dari

sebuah fungsi dan kedudukannya di dalam struktur sosial yang ada. Nilai, norma, kaidah dan prinsip-prinsip organisasi menentukan corak perilaku dan tindakan individu. Individu hanya menjalankan fungsi dan kewajiban yang merefleksikan kewenangan yang diberikan oleh struktur tersebut

Dengan demikian, kapasitas, pengalaman, kompetensi, keahlian, pengetahuan dan semua potensi yang dimiliki individu, tidak mendapat perhatian di dalam pemikiran ini. Struktur lingkungan atau organisasi sepenuhnya mengontrol perilaku individu. Tindakan individu hanya mencerminkan pengejawantahan dari aturan, norma, prinsip dan kaidah yang dimiliki organisasi atau lingkungan sosial di mana ia berada dan mengabaikan kenyataan bahwa sebenarnya individu juga mempunyai kapasitas untuk mengendalikan dan mengontrol lingkungan atau organisasi yang ia ikuti. Jelas, pemikiran ini menekankan struktur yang deterministik.

Pemikiran kedua, sebaliknya-menjelaskan bahwa individu adalah yang penting dalam setiap lingkungan sosial. Karakteristik organisasi atau struktur sosial hanyalah merupakan produk dari interaksi yang terjadi di antara individu-individu. Sistem pendidikan, organisasi masyarakat, rumah sakit, pemerintahan, partai politik dan semua bentuk organisasi tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ada *joint action* di antara individu-individu.

Bentuk organisasi atau struktur sosial hanyalah merupakan produk dari tindakan tersebut. Dengan demikian, kualitas individu menjadi penentu kualitas organisasi atau struktur sosial tersebut. Kompetensi, keahlian,

pengalaman, emosi, pengetahuan, kapabilitas dan semua potensi yang dimiliki punya andil yang besar dalam menentukan corak struktur atau organisasi sosial yang ada.

Anthony Giddens seorang sosiolog asal Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern. tidak memilih salah satu dari keduanya namun merangkum kedua teori tersebut dan munculah teori Strukturasi, dalam teori strukturasi Anthony Giddens menyatakan bahwa kehidupan sosial lebih dari sekedar tindakan individual tetapi kehidupan sosial juga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sosial. Giddens berpendapat bahwa “Human Agency dan Struktur Sosial” berhubungan satu dengan yang lain, tindakan-tindakan yang berulang (Repetisi) dari agen-agen individual-lah yang memproduksi struktur tersebut. Lebih lanjut Giddens menjelaskan bahwa tindakan sehari-hari seseorang memperkuat dan memproduksi seperangkat ekspektasi. Perangkat ekspektasi orang-orang inilah yang membentuk “Kekuatan Sosial” dan “Struktur Sosial”. Ini berarti terdapat struktur sosial, tradisi, institusi, aturan moral merupakan cara-cara yang mapan untuk melakukan sesuatu. Namun dalam uraian di atas juga berarti bahwa semua Struktur itu bisa dirubah, ketika orang-orang sudah mulai mengabaikan, menggantikan atau mereproduksi cara yang berbeda.

Teori Strukturasi Adaptif

Teori Strukturasi Adaptif ini di adaptasikan dari teori strukturasi dari Anthony Giddens. Teori Strukturasi Adaptif tersebut diformulasikan sebagai

proses produksi dan reproduksi dari sistem sosial yang dihasilkan lewat penggunaan aturan - aturan diantara anggota sistem sosial tersebut serta melalui pola - pola interaksi yang terjadi didalamnya. DeSantics dan poole mengadopsi teori tersebut untuk mempelajari interaksi antara group - group dan organisasi - organisasi terhadap teknologi informasi, mereka sebut hal ini sebagai teori strukturasi adaptif. teori ini mengkritisi masalah pola - pola teknosentris dilihat dari sudut pandang penggunaan teknologi dan mereka menekankan pada masalah aspek - aspek sosialnya. berbagai group dan organisasi menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka yang secara dinamis menciptakan persepsi - persepsi tentang peranan dan kegunaan dari teknologi, dan bagaimana hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan aktivitas mereka sehari - hari. persepsi tersebut bisa berbeda - beda didalam group - group tersebut. persepsi tersebut memengaruhi cara bagaimana teknologi itu digunakan dan oleh karena itu memberikan pengaruh kepada produktifitas group atau hasil - hasil group.

Teori strukturasi Adaptif ini cocok digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari peranan - peranan teknologi informasi lanjut dalam sebuah organisasi. teori ini menganalisa perubahan proses - proses yang terjadi melalui dua sudut pandang kemanfaatannya,

1. tipe - tipe struktur yang disediakan oleh teknologi lanjut.
2. struktur yang melekat pada perilaku manusia sebagai seseorang yang berinteraksi dengan teknologi - teknologi tersebut.

Selama ini banyak peneliti tentang perilaku kelompok dianggap terlalu menyederhanakan tentang perilaku kelompok. Dalam sebuah proses pengambilan keputusan dalam kelompok, mereka mengajukan model sebagai berikut:

1. Orientasi: ketika tujuan dari kelompok belum jelas, hubungan antar anggota juga belum jelas, masing-masing anggota memerlukan lebih banyak informasi
2. Konflik: banyaknya sudut pandang dan pendapat yang berbeda tentang bagaimana seharusnya kelompok tersebut terbentuk, masing-masing anggota memiliki pespektif sendiri-sendiri
3. Koalisi: tensi mulai berkurang melalui negosiasi yang damai, mulai mencari titik temu antar anggota
4. Pengembangan: kelompok mulai mencari cara untuk mencari satu solusi bersama, dimana semua anggota merasa terlibat dan berinteraksi di dalamnya.
5. Intergrasi: munculnya solidaritas, dan tujuan kelompok tidak lagi dilihat sebagai sebuah kewajiban atau tuntutan.

Strukturasi Kepemimpinan Lokal

Lantas, pertanyaannya adalah manakah dari kedua pemikiran besar tersebut yang paling baik dan pantas diterapkan bagi kepemimpinan lokal di daerah kita?

Jawabannya adalah keduanya tidak cukup memadai bagi proses pelebagaan kepemimpinan yang bertumpu pada pelaku dan proses

pelebagaan bagi organisasi yang bertumpu pada budaya atau kualitas organisasi. Padahal bagi kepentingan otonomi daerah, persoalan pelembagaan kepemimpinan dan pelembagaan organisasi sebagai organisasi yang kuat, sangat dibutuhkan sehingga dapat menjadi daerah (baca: pemkab dan pemkot) yang handal, distingtif dan kompetitif.

Alasannya adalah pertama, organisasi yang sangat kuat, yang bertumpu pada kekuatan struktur dan formalitas, kepatuhan dan kedisiplinan yang kaku, mengakibatkan kreatifitas dari individu-individu yang ada di dalamnya dihambat atau bahkan direpresi. Dinamika yang ada bersifat mekanistik. Tindakan individu hanyalah merupakan manifestasi dari kaidah formalitas. Dalam corak yang demikian, penghargaan terhadap perbedaan, sikap kritis, pengembangan sumber daya manusia, emosi dan ekspektasi dari individu-individu yang ada, tidak mendapat perhatian yang semestinya.

Lambat laun, organisasi yang demikian akan mengalami kebangkrutan. Kalaulah ada individu yang bertahan di dalamnya, pasti ada pertimbangan krusial yang merupakan “simalakama” yang sifatnya subsistensi sebagai batas ambang kepentingan. Untuk organisasi birokrasi misalnya, alasan tersebut menyangkut kestausan kepegawaian. Sedangkan untuk organisasi lainnya mungkin bagi individu-individu tertentu, melihatnya tidak ada alternatif.

Namun sebaliknya, sebagai alasan kedua ini, bahwa individu yang sangat kuat di dalam organisasi juga mempunyai dampak negatif yang signifikan bagi pengembangan dan kualitas organisasi dan struktur sosial. Jangan sampai terjadi, karena

kedudukan, kompetensi, keahlian, senioritas, pangkat dan jabatan dari seorang individu, menjadikan mesin organisasi tidak berdaya. Sebab jika semua faktor tersebut melampaui batas-batas dan prinsip-prinsip berorganisasi, pada akhirnya organisasi dan struktur sosial yang telah dibangun itupun tidak ada artinya. Implikasinya sangat jelas, bagi organisasi dapat terjadi semua kebijakan dan aturan main hanya ditentukan oleh seorang saja. Organisasi atau struktur sosial dengan demikian dicerminkan hanya seorang individu (*one man show*).

Pemecahannya adalah dengan mensintesa kedua pemikiran tersebut. Hubungan antara individu dengan struktur sosial merupakan dualitas. Asumsinya setiap individu mempunyai *resources* yang meliputi semua potensi yang dimiliki seperti pengetahuan, keahlian, kompetensi, pengalaman, dan visi kepemimpinan. Demikian pula setiap struktur atau organisasi memiliki *resources* yang mencakup *hard power* dan *soft power*. Setiap organisasi umumnya mempunyai sumber daya material dan sumber daya nonmaterial. Ia memiliki teknologi, piranti, bangunan, sistem, aturan, norma, konvensi, dan nilai.

Dualitas dalam pengertian ini adalah baik struktur sosial ataupun aktor keduanya secara resiprokal saling mempengaruhi dan memberi kontribusi dan corak bagi keduanya. Kualitas organisasi ditentukan oleh kualitas tindakan individu, sedangkan kualitas tindakan individu ditentukan oleh kualitas organisasi. Inilah apa yang disebut Anthony Giddens sebagai strukturasi yang kemudian diadopsi ke dalam praktek-praktek berorganisasi secara luas.

Strukturasi Dalam Wacana Surakarta Sebagai Propinsi

Nah, dasar pemikiran tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menggenapkan motif dari tulisan ini. Yakni, melihat potensi wilayah daerah. Sebagaimana kita ketahui Surakarta diapit oleh 6 pemerintah kabupaten yang merupakan sumber daya yang luar biasa. Dengan status sebagai daerah yang menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, keenam wilayah dan ditambah dengan pemerintah kota Surakarta, dapat diintegrasikan dalam sebuah platform pembangunan bersama yang modern, distingtif dan kompetitif. Namun, untuk melakukan hal itu, pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan strukturasi kepemimpinan dengan melakukan *joint action* dari masing-masing pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten.

Dengan dasar tersebut, bukannya tidak mungkin, wilayah karesiden Surakarta menjadi sebuah provinsi yang kredibel, sedangkan pemerintah kabupaten statusnya meningkat menjadi kotamadya yang dipimpin oleh seorang walikota. Bersamaan dengan itu, kota Surakarta dan sekitarnya menjadi wilayah yang terbuka dan dikenal tidak saja di tanah air tetapi juga di mancanegara. Keinginan ini sepertinya pernah menjadi isu di lingkungan kita. Setidaknya isu yang pernah beredar di masyarakat, adanya keinginan agar wilayah Surakarta dan sekitarnya menjadi sebuah provinsi sendiri.

Namun harus dibedakan keinginan tersebut dengan pretensi politis yang dioreintasikan pada jabatan baru seperti Gubernur ataupun pretensi-pretensi primordial lainnya. Pengubahan status pemerintahan terjadi karena

memang ke depan telah disiapkan dan dimatangkan dalam proses interaksi yang terjadi semua elemen. Penguatan-penguatan harus dilakukan baik penguatan secara kelembagaan pemerintahan sebagai organisasi birokratis ataupun penguatan pada aktor-aktor pelaku pembangunan itu sendiri termasuk penguatan dalam kelembagaan kepemimpinan. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila pemikiran ke arah itu, patut dipikirkan kembali dengan melakukan perencanaan dan penataan yang terintegrasi.

Kesimpulan

Strukturasi kepemimpinan lokal hanyalah istilah yang melihat potensi ke arah itu yang dapat dimulai dengan melakukan pelembagaan antara kualitas pemerintah daerah dengan pemimpin daerah yang ada, yang mencakup para bupati, walikota dan tokoh-tokoh masyarakat. Kesadaran untuk mengembangkan struktur sosial yang berkualitas dan kesadaran untuk mengembangkan sumber daya manusia secara keseluruhan akan menghasilkan sinergi pemerintahan yang berkualitas pula. Untuk itu, harapan tahap embrionik ini bertumpu pada para Bupati dan Walikota.

Daftar Pustaka:

Anthony Giddens : *Central Problems in Sicial Theory, 2nd Edition*, London: Polity Press, 1993

Anthony Giddens : *Teori Strukturasi; Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Pelajar,

Griffin, Emory A., *A First Look at
Communication Theory, 5th
edition*, New York: McGraw-Hill,
2003, p.244—257

UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah